

**DISHARMONISASI PELAKSANAAN PASAL 5 PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 438 TAHUN 2013 TERKAIT HAK  
DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Oleh

Dewi Dwi Irawati

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Jalan MT. Hayono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Email: [105010113111019@mail.ub.ac.id](mailto:105010113111019@mail.ub.ac.id)

***ABSTRACT***

*This writing a thesis writer discussed the disharmonisasi the implementation of article 5 university brawijaya number 438 2013 related rights lecturer fixed non civil servant univeritas brawijaya. This thesis research aims to know the implementation of the exercise of a non-civil servant lecturer University of brawijaya, barriers that affect implementation, as well as solutions to confront the barriers or constraints on the implementation of the rights of non-civil servant lecturer University of brawijaya. An effort to find out about the exercise of, constraints yang affecting the implementation and solutions in the exercise of rights of a lecturer fixed non civil servant brawijaya, university a method of an approach that is worn is juridical empirically; all of the data in an analysis by descriptive analysis. Based on the results of the research, the author answers to existing problems, and that*

*implementation of the rights of non-permanent lecturer civil servant UB does not comply with regulation to brawijaya University Rector.*

Kata Kunci : Disharmonisasi, Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya, Terkait Hak Dosen Non Pegawai Negeri Sipil

### **ABSTRAKSI**

DEWI DWI IRAWATI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, Disharmonisasi Pelaksanaan pasal 5 Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Twrkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya, Lutfi Effendi, SH, M. Hum ; Dr. Shinta Hadiyantina, SH. MH.

Penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai disharmonisasi pelaksanaan pasal 5 universitas brawijaya nomor 438 tahun 2013 terkait hak dosen tetap non pegawai negeri sipil univeritas brawijaya. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan hak dosen non pegawai negeri sipil universitas brawijaya, hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan, serta solusi untuk menghadapi hambatan atau kendala mengenai pelaksanaan hak dosen non pegawai negeri sipil universitas brawijaya. Upaya mengetahui mengenai pelaksanaan, hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan dan solusi dalam pelaksanaan hak dosen tetap non

pegawai negeri sipil universitas brawijaya, metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, seluruh data di analisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan hak dosen tetap non pegawai negeri sipil universitas brawijaya tidak sesuai dengan peraturan rektor universitas brawijaya.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar belakang**

Pendidikan di Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan jumlah peserta didik. Perkembangan peserta didik tersebut seiring dengan perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah. Jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 255.461.700 juta jiwa<sup>1</sup> dengan jumlah usia kuliah sebanyak 5 juta menunjukkan bahwa kebutuhan akan adanya lembaga pendidikan berupa universitas sangat penting. Sayangnya jumlah Universitas yang ada di Indonesia untuk Universitas yang berstatus negeri hanya 100<sup>2</sup>. Sedangkan untuk universitas yang berstatus swasta mencapai angka lebih dari 100. Keseluruhan universitas tersebut untuk melayani mahasiswa tentu membutuhkan fasilitas yang mumpuni.

Guna mendukung upaya untuk mewujudkan perkembangan bangsa serta kecerdasan bangsa, tentunya Universitas harus mampu untuk memberikan fasilitas yang baik. Fasilitas-fasilitas seperti sarana prasarana kampus yang meliputi perpustakaan, ruang

---

<sup>1</sup>Data diperoleh dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Didownload pada tanggal 18 April 2014.

<sup>2</sup>Data diperoleh dari [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id). Didownload pada tanggal 18 April 2014.

kelas yang nyaman serta beberapa prasarana lainnya adalah penting untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Fasilitas lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan keberadaan sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajar atau dosen. Standart yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) terkait dengan perbandingan jumlah dosen dengan mahasiswa adalah 1:25<sup>3</sup>. Perbandingan dosen dan mahasiswa pada sebuah per dosenan tinggi idealnya satu banding 12 dan lebih baik lagi jika bisa satu dosen banding 10 mahasiswa agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik. Maka dari itu per dosenan tinggi juga harus memikirkan persentasi jumlah dosen dengan mahasiswa. Dengan jumlah mahasiswa yang tidak terlalu banyak dalam satu kelas, dosen juga akan lebih maksimal melakukan transfer ilmunya. Artinya jika terdapat 100 mahasiswa berarti dibutuhkan 4 orang dosen.

Universitas Brawijaya sebagai Universitas dengan jumlah mahasiswa 61.511<sup>4</sup>. merupakan universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak itu, Universitas Brawijaya hanya memiliki dosen sejumlah 1.928 dengan demikian standart yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Universitas Brawijaya mengambil suatu jalan memenuhi standart tersebut dengan menambah jumlah dosen agar bisa memenuhi standart yang harus dipenuhi, dengan cara menambahkan jumlah dosen. Oleh pihak Universitas Brawijaya tersebut dilakukan dengan cara menerima tenaga dosen tetap Non PNS, agar bisa membantu sistem pembelajaran di Universitas Brawijaya.

---

<sup>3</sup> Data diperoleh dari [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id). Didownload pada tanggal 18 April 2014.

<sup>4</sup> Data diperoleh dari <http://ub.ac.id/tentang/profil-universitas>. Didownload pada tanggal 11 juni 2014.

Pelaksanaan hak dan kewajiban antara dosen PNS dan dosen tetap Non PNS terlihat beberapa perbedaan, khususnya terkait dengan hak. Kewajiban untuk mengajar dosen PNS maupun Non PNS sebagai tenaga profesional sama. Kewajiban yang dilakukan oleh dosen PNS seperti untuk bertujuan melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab juga dilaksanakan oleh dosen tetap Non PNS<sup>5</sup>. Tetapi ironisnya dalam aspek hak terlihat berbeda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa dosen tetap Non PNS, ada beberapa hal yang menunjukkan adanya perbedaan tentang hak dosen tetap Non PNS dan dosen PNS. Beberapa perbedaan tersebut seperti<sup>6</sup>:

1. Adanya perbedaan hak cuti melahirkan antara dosen tetap non PNS dengan dosen PNS.
  - a. Dosen tetap non PNS diberi hak cuti selama 2 bulan
  - b. Dosen PNS diberi hak cuti selama 3 bulan
2. Adanya perbedaan perlakuan terhadap KPRI antara dosen tetap non PNS dengan dosen PNS:
  - a. Dosen tetap non PNS diberi hak pinjaman sebesar 50jt, dan cicilan terhadap pinjaman tersebut selama 3 tahun.

---

<sup>5</sup> Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan dosen tetap non PNS Fakultas Hukum Universitas Brawijayapada tanggal 3 Maret 2014.

- b. Dosen PNS diberi hak pinjaman sebesar 100jt, dan cicilan terhadap pinjaman tersebut bisa lebih dari 3 tahun.
- 3. Adanya perbedaan terhadap hak pensiunan terhadap dosen tetap non PNS dan dosen PNS:
  - a. Dosen tetap non PNS belum jelas statusnya
  - b. Dosen PNS sudah jelas tentang status pensiunannya
- 4. Adanya perbedaan terhadap ketidak tepatan waktu pembayaran atau gaji terhadap dosen tetap non PNS dengan dosen PNS :
  - a. Dosen tetap non PNS tidak tepat waktu
  - b. Dosen PNS tepat waktu
- 5. Adanya perbedaan jaminan kesehatan terhadap dosen tetap non PNS dengan dosen PNS:
  - a. Dosen tetap non PNS belum ada jaminan asuransi kesehatan
  - b. Dosen PNS sudah ada jaminan kesehatan
- 6. Adanya perbedaan uang makan terhadap dosen tetap non PNS dengan dosen PNS:
  - a. Dosen tetap non PNS mendapatkan uang makan sebanyak Rp. 25.000,- perhari.
  - b. Dosen PNS mendapatkan uang makan sebanyak Rp. 30.000,- perhari.

Permasalahan yang tampak dari deskripsi peraturan serta praktik pelaksanaan kewajiban Dosen tetap Non PNS di Universitas Brawijaya tersebut adalah adanya kesenjangan antara kontrak kerja yang dibuat oleh Universitas Brawijaya dengan Dosen Tetap Non PNS yang menyebutkan bahwa hak dan kewajiban Dosen Tetap Non PNS sama dengan Dosen PNS. Walaupun gaji yang menjadi hak Dosen Tetap Non PNS adalah sama dengan Dosen PNS maka nominalnya harus sama karena pengertian mengenai gaji sesuai dengan PP 37/2009 adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata kunci dari pengertian tersebut adalah gaji yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian artinya bahwa gaji yang menjadi hak Dosen tetap Non PNS adalah sama dengan

Dosen PNS karena tidak mungkin Peraturan Perundang-undangan menyatakan perbedaan antara gaji Dosen PNS dengan Dosen Tetap Non PNS. Permasalahan lainnya adalah belum adanya kejelasan pengaturan mengenai peningkatan jenjang karier dosen tetap non PNS di Universitas Brawijaya.

Atas dasar peraturan tentang hak dan kewajiban tersebut, sangat jelas bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya di Universitas Brawijaya Malang masih terdapat permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “Disharmonisasi Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya

Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya”.

### **Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi Disharmonisasi pada Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya di Universitas Brawijaya Malang?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya?
3. Apa solusi yang diambil oleh Universitas Brawijaya dalam menghadapi hambatan dan kendala untuk mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya?



## **PEMBAHASAN**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris maksudnya adalah mengkaji bagaimana suatu peraturan dilaksanakan oleh masyarakat. Pada akhirnya nanti akan diketahui apakah suatu peraturan yang ditetapkan dilaksanakan atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis suatu norma yang berisikan perintah, larangan, izin dan dispensasi. Norma hukum berbicara tentang apa yang harus dan apa yang tidak harus, atau apa yang akan, apa yang sedang dan yang sudah terjadi, sedangkan fakta-fakta sosial membicarakan hal-hal yang dihubungkan dengan hukum harus dianggap sebagai faktor deskriptif<sup>7</sup>.

#### **Lokasi penelitian**

Penulis mengambil lokasi penelitian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No. 169 Malang.

#### **Sumber Data**

Berkaitan dengan data primer maka dalam penelitian skripsi ini digunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer antara lain yang berkaitan dengan data primer dalam penelitian ini yang menjadi sumber adalah

---

<sup>7</sup> Nasution, Johan B, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 130.

responden yang kompeten memberikan informasi mengenai factor penghambat mengenai pelaksanaan pasal 5 peraturan rektor universitas brawijaya nomor 438 tahun 2013 terkait hak dosen tetap non pegawai negeri sipil universitas brawijaya. Sedangkan data sekunder dalam penelitian skripsi ini berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Dosen.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Dosen.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perdosenan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perdosenan Tinggi Swasta.
- f. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya.
- g. Surat Perjanjian Kerja Dosen Tetap Non PNS di Universitas Brawijaya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi: pengumpulan data yang diperoleh dari data secara langsung di lokasi penelitian serta mencari data-data sesuai dengan fakta.
- b. Interview: pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai narasumber/responden. Pengambilan data dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu pihak yang hendak diwawancara. Pihak yang diwawancara dalam penelitian ini adalah pengambil dan penentu kebijakan terkait dengan dosen tetap non pegawai negeri sipil.

### **Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah teknik penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas objek yang akan diteliti yaitu sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Proses pengumpulan data:

Data ini didasarkan pada observasi.

2. Penyajian data

Data dikumpulkan sebagai sumber informasi yang tersusun dan dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Kesimpulan

Proses penggambaran/mengartikan data yang disajikan setelah melalui analisis.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 146

## **HASIL PENELITIAN**

### **Disharmonisasi Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya di Universitas Brawijaya Malang**

#### **1. Pelaksanaan Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Brawijaya**

Terjadinya disharmonisasi terhadap pelaksanaan hak atas Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil, karena adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan peraturan yang telah disesuaikan oleh Universitas Brawijaya dengan kenyataannya dan dengan secara fakta-fakta yang didapatkan oleh para Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil. Padahal didalam Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 jelas menyebutkan adanya hak-hak Dosen Tetap Non PNS hampir sama dengan Dosen Tetap PNS, akan tetapi didalam kenyataannya sangat berbeda dengan adanya peraturan tersebut.

Dalam pelaksanaan pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 disebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DT-UB berhak atas<sup>9</sup>:

- a. Memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dosen tetap Non PNS Universitas Brawijaya serta jaminan kesejahteraan sosial;

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan dosen tetap non PNS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 3 Maret 2014.

- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan; dan
- h. Mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara.

Disharmonisasi tersebut karena adanya ketidaksesuaian yang terjadi dengan perbedaan yang dialami antara Dosen tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil, mengenai pelaksanaan hak Dosen tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya, beberapa perbedaan seperti yang diuraikan sebagai berikut<sup>10</sup> :

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan dosen tetap non PNS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 3 Maret 2014.

Tabel 4.2<sup>11</sup>

## Perbedaan Dosen tetap non PNS dan Dosen tetap PNS

Dosen tetap non PNS	Dosen PNS
Hak cuti melahirkan 2 bulan	Hak cuti melahirkan 3 bulan
Diberi hak pinjaman sebesar 50jt, dan cicilan terhadap pinjaman tersebut selama 3 tahun	Diberi hak pinjaman sebesar 100jt, dan cicilan terhadap pinjaman tersebut bisa lebih dari 3 tahun
Hak pensiunan, belum jelas statusnya	Hak pensiunan, sudah jelas tentang status pensiunannya
Ketidak tepatan waktu pembayaran atau gaji, tidak tepat waktu	Ketidak tepatan waktu pembayaran atau gaji, tepat waktu
Jaminan kesehatan, belum ada jaminan asuransi kesehatan	Jaminan kesehatan, sudah ada jaminan kesehatan
Uang makan terhadap dosen, mendapatkan uang makan sebanyak Rp. 25.000,- perhari	Uang makan terhadap dosen, uang makan sebanyak Rp. 30.000,- perhari

*Sumber : Data diolah dari hasil wawancara, 2014*

Perbedaan-perbedaan yang dialami oleh Dosen Tetap Non PNS dengan Dosen Tetap PNS, jelas mengakibatkan adanya kecemburuan sosial dalam bertugas sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Maka menyebabkan terjadinya simpangsiur atas terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut dalam peraturan yang diterapkan oleh Universitas Brawijaya.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan dosen tetap non PNS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 3 Maret 2014.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bagian Kepegawaian yaitu pelaksanaan hak yang diterima oleh Dosen tetap Non Pegawai Negeri Sipil sama seperti Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil. Hanya saja ada beberapa perbedaan. Seperti adanya hak gaji Dosen tetap PNS Universitas Brawijaya digaji oleh pemerintah sedangkan gaji Dosen tetap Non PNS digaji oleh Universitas Brawijaya sendiri<sup>12</sup>.

## **2. Perbedaan Antara Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 tahun 2013 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005**

Perbedaan yang terjadi dengan adanya Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 tahun 2013 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 sangat jelas adanya beberapa perbedaan antara kedua peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3

Perbedaan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya pasal 5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
--	---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 14 juli 2014

a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dosen tetap Non PNS Universitas Brawijaya serta jaminan kesejahteraan sosial;	a.memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;	b.mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;	c.memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;	d.memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;	e.memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;	f.memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan; dan	g.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
h. mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara.	

Peraturan yang diperoleh atas kedua peraturan tersebut jelas adanya peraturan yang sama, akan tetapi ada beberapa yang tidak sesuai yaitu dari hak cuti tahunan dan cuti diluar tanggungan Negara. Padahal peraturan yang diatur dalam peraturan Rektor Universitas Brawijaya tidak boleh menyimpang dari peraturan Perundang-undangan



yang telah diterapkan. Akan tetapi pihak Universitas Brawijaya membuat peraturang yang menyimpang dari adanya peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikianpula dari pelaksanaan jenjang karir Dosen Tetap Non PNS disetarakan dengan Dosen Tetap PNS sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (1) yang meliputi persyaratan memperoleh angkat kredit kumulatif dari kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang dengan rincian sebagai berikut:

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| a. Asisten ahli, golongan III/a | : 100  |
| b. Asisten ahli, golongan III/b | : 150  |
| c. Lektor, golongan III/c       | : 200  |
| d. Lektor, golongan III/d       | : 300  |
| e. Lektor kepala, golongan IV/a | : 400  |
| f. Lektor kepala, golongan IV/b | : 550  |
| g. Lektor kepala, golongan IV/c | : 700  |
| h. Guru besar, golongan IV/d    | : 850  |
| i. Guru besar, golongan IV/e    | : 1050 |

Untuk memperoleh jenjang karir dan kepangkatan Dosen tetap Non PNS, maka harus memiliki penilaian yang telah ditentukan. Yang sebagaimana Dosen tetap Non PNS harus memperoleh komposisi angka kredit kumulatif yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan : 40 % (Minimal)
- b. Bidang Penelitian : 25 % (Minimal)
- c. Bidang Pengabdian : 15 % (Minimal)
- d. Penunjang : 20 % (Maksimal)

Dosen tetap Non PNS juga berhak atas jabatan akademik yang memiliki golongan-golongan, angka kredit dan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah diatur oleh pihak Universitas Brawijaya, sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (4) yaitu mengenai tentang jabatan akademik.

Tabel 4.4

Jabatan Akademik Universitas Brawijaya

No	Golongan	Angka kredit Akumulatif	Distribusi Kegiatan			
			Pendidikan 40%	Penelitian 25%	Pengabdian 15%	Penunjang 20%
1	Asistensi Ahli, Gol.III/a	100	40	25	15	20
2	Asistensi Ahli, Gol.III/b	150	60	37,5	22,5	30
3	Lektor, Gol.III/c	200	80	50	30	40
4	Lektor, Gol.III/d	300	120	75	45	60
5	Lektor Kepala, Gol.IV/a	400	160	100	60	80
6	Lektor Kepala, Gol.IV/b	550	220	137,5	82,5	110
7	Lektor Kepala, Gol.IV/c	700	420	174	105	140
8	Guru Besar, Gol.IV/d	850	340	212,5	127,5	170
9	Guru Besar, Gol.IV/e	1050	420	262,5	157,5	210

Dari jabatan akademik yang ada diatas Universitas Brawijaya menentukan jabatan-jabatan tertentu yang terdiri dari beberapa golongan, angka kredit kumulatif dan beberapa distribusi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan nilai yang telah diterapkan untuk Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya.

**Hambatan yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya**

**1. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat keadaan disharmonis pelaksanaan hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil khususnya Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya merupakan masalah yang sangat serius karena dapat memicu ketidakpuasan bagi Dosen Tetap non PNS yang sudah bekerja di Universitas Brawijaya, dimana ada kecemburuan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pengajar di lingkungan Universitas Brawijaya<sup>13</sup>.

Penyebab terjadinya disharmonisasi hukum dalam pembentukan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya apabila dilihat dari asal/sumber

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Brawiajya Malang pada tanggal 14 juli 2014

timbulnya disharmonisasi, berasal dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor penyebab disharmonisasi yang berasal dari lembaga pembentuk peraturan (*internalitas*) dan faktor penyebab yang berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan (*eksternalitas*).

1. Faktor Internalitas, penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan, timbulnya dari internal Universitas Brawijaya sendiri dan para dosen sebagai lembaga yang berwenang membentuk peraturan dalam berbagai tingkatannya, faktor *internalitas* dapat terdiri dari<sup>14</sup> :

- a. Belum adanya kepastian mengenai kesenjangan sosial terhadap Dosen Tetap Non PNS;
- b. Masih menunggu adanya Surat Keputusan Rektor mengenai jaminan kesehatan atas Dosen Tetap Non PNS;
- c. Dosen yang bersangkutan belum jelas dengan adanya peraturan yang di terapkan oleh Universitas Brawijaya;
- d. Peraturan yang sering berubah-ubah mengenai pelaksanaan hak Dosen Tetap Non PNS terutama mengenai perjanjian Dosen Tetap Non PNS menjadi kesimpangsiuran dalam melaksanakan hak-hak Dosen Tetap Non PNS yang belum terlaksana dengan baik.

2. Faktor *eksternalitas* adalah faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah, antara lain :

---

<sup>14</sup> ibid

- a. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Perbedaan materi resistensi dan disintegrasi bangsa, oleh karena itu disharmonisasi perlu ditangani dan dan diselesaikan dengan cepat mengingat akibat yang dapat ditimbulkan. Antara harmonisasi vertical dan horizontal peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia.
- c. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan di atas peraturan yang berlaku dengan Putusan dari pihak rektorat Universitas Brawijaya.
- d. Benturan wewenang antara peraturan yang ada dalam peraturan Undang-Undang dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya pembagian wewenangnya tidak jelas dan sistematis.
- e. Belum adanya regulasi yang baku dan lebih merinci tentang harmonisasi hukum dalam pembentukan Peraturan.

Demikianpula ada beberapa permasalahan-permasalahan mengenai disharmonisasi yang terjadi terhadap Dosen Tetap Non PNS yaitu:

1. Sertifikasi atau penunjang untuk Dosen belum merata, khususnya bagi dosen yang hampir memasuki usia pensiun. Mereka belum mengerti benar akan sistematika program sertifikasi dari Pemerintah. Serta dosen tersebut harus mengikuti ujian-ujian yang dirasa sulit untuk usia tersebut dan ujian itu menggunakan alat-alat IT seperti komputer dan internet yang belum tentu mereka kuasai.

2. Dalam Undang-Undang Dosen Tetap Non PNS cenderung menguntungkan Dosen Tetap PNS, sementara itu di Indonesia Dosen Tetap Non PNS jumlahnya sangat banyak serta menanggung tugas dan tanggungjawab yang sama dengan Dosen Tetap PNS.
3. Jumlah peminat profesi dosen sangat meningkat demi mengejar status sertifikasi.

Banyak dosen kurang mengerti tentang karier akademiknya dan hak-hak para dosen yang kurang diperhatikan perguruan tinggi bersangkutan, sehingga ada dosen yang sudah mengajar bertahun-tahun bahkan sudah 15 tahun, belum mempunyai jabatan akademik. Banyak membajak dosen dari perguruan tinggi lain oleh perguruan tinggi lainnya. Timbulnya masalah-masalah antara dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tempat dipekerjakan, sehingga keberadaan dosen PNS yang dipekerjakan (dpek) pada PTS tidak sesuai dengan tujuan pemerintah. Banyak PTS yang beranggapan bahwa bantuan dosen PNS diartikan sebagai bantuan uang kepada PTS tersebut. Adapula dosen PNS sering berpindah-pindah dari PTS yang satu ke PTS yang lain atau ada yang dikembalikan kepada pemerintah (Kopertis) dengan berbagai alasan. Belum lagi masalah gaji dosen PNS, masalah "*home base*" dosen PNS yang dipekerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua Bagian Kepegawaian Universitas Brawijaya, hambatan yang dialami oleh Universitas Brawijaya untuk melaksanakan pelaksanaan terkait hak Dosen tetap Non PNS yaitu belum adanya kepastian mengenai kesejahteraan sosial untuk Dosen tetap Non PNS, dikarenakan belum

adanya Surat Keputusan (SK) dari Rektor Universitas Brawijaya mengenai kesenjangan sosial terhadap Dosen tetap Non PNS<sup>15</sup>.

## **2. Faktor Pendukung**

Faktor yang mempengaruhi adanya hambatan tidak dilihat dari sisi faktor penghambat saja, akan tetapi ada faktor pendukung yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya. Dilihat dari kepentingan institusi adalah sangat penting karena untuk akreditasi Fakultas Hukum itu sendiri. Akreditasi bagi fakultas juga sangat dibutuhkan semua juga didukung oleh para dosen yang ada di Fakultas Hukum. Bagi dosen yang bersangkutan faktor pendukungnya adalah memenuhi bentuk kualitas diri dari dosen tersebut yang hasilnya akan berdampak pada perubahan-perubahan terhadap kewenangan tertentu, seperti misalnya dalam hal keahliannya dalam bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa, mengkajinya, serta dapat menempu mata kuliah secara mandiri<sup>16</sup>.

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan<sup>17</sup> :

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum.
- c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 14 juli 2014

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup> Data diperoleh dari [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id). Didownload pada tanggal 8 Juli 2014

- d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Adapun persyaratan atau peraturan dalam pelaksanaan hak Dosen Tetap Non PNS khususnya bagi Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini sebagai faktor pendukung antara lain:

- a) Dosen Tetap Non PNS adalah pegawai UB yang diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
- b) Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
- c) Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.
- d) Dalam melaksanakan tugas keprofesional, Dosen Tetap Non PNS berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja.
- e) Promosi meliputi kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan akademik.



- f) Jenjang jabatan akademik Dosen Tetap Non PNS terdiri atas asistensi ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- g) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualitas akademik doktor.

**Solusi yang diambil oleh Universitas Brawijaya dalam menghadapi hambatan dalam mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya.**

Berkaitan dengan sejumlah hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 tahun 2013 terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil. Maka sudah seharusnya pihak Universitas Brawijaya menemukan cara terbaik untuk mencari jalan keluar bagi masalah-masalah tersebut.

Solusi yang diambil Universitas Brawijaya untuk menghadapi hambatan dalam mendisharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan

Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya<sup>18</sup> :

- a. Kesejahteraan Dosen tetap Non Pegawai Negeri Sipil terjamin;

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Brawiajya Malang pada tanggal 14 juli 2014.

- b. Dosen tetap Non PNS mendapatkan penghargaan yang layak untuk pengabdianya terhadap bangsa dan Negara Indonesia;
- c. Meningkatnya kualitas dan mutu tenaga pendidik Dosen tetap Non PNS karena harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga mendapatkan prestasi;
- d. Dosen tetap Non PNS bisa lebih profesional dengan tanggung jawab yang besar;
- e. Melakukan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk memenuhi hak Dosen tetap Non PNS tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya dosen perlu meningkatkan profesionalismenya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin serta mendapatkan hak-haknya, selalu termotivasi dalam suasana yang kondusif, terbebas dari masalah dan hambatan teknis, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Seorang dosen baru dapat menjalankan fungsinya, bila kesejahteraan dosen yang dapat menjamin keluarganya belum terpenuhi, sangat sulit untuk meningkatkan profesionalisme dosen. Ringkasnya selain kesejahteraan dosen yang belum terpenuhi, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi dosen. Usaha menumbuh kembangkan kemampuan profesi dan pengembangan karir dosen guna meningkatkan profesionalisme terlebih dahulu perlu ditingkatkan kesejahteraannya, terbebas dari kemelut dan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas mulia untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Untuk itu pula dosen

perlu mempunyai visi dan misi sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik<sup>19</sup>.

Pengalihan untuk dosen dan tenaga kependidikan Non PNS tidak memerlukan tes atau menunggu formasi reguler, karena memang dalam kenyataannya, dosen dan tenaga kependidikan non-PNS pada Universitas Brawijaya bukanlah pegawai baru. Mereka telah bekerja, berkarya, dan mengabdikan untuk kurun waktu yang lama. Beberapa dari mereka, yang telah berstatus sebagai pegawai Universitas Brawijaya, telah memiliki jabatan fungsional dan golongan tertentu, bahkan ada pula yang telah menjadi guru besar. Apabila yang berlaku adalah proses rekrutmen CPNS biasa, maka bisa dipastikan bahwa mereka akan kehilangan tidak saja karya dan waktu, tetapi juga jabatan fungsional mereka selama ini. Di samping merugikan dosen dan tenaga kependidikan, proses rekrutmen CPNS seperti ini juga akan merugikan Universitas Brawijaya itu sendiri, karena proses regenerasi yang telah dilakukan selama ini praktis harus dimulai dari awal lagi.

Selain itu, pada kenyataannya pengalihan status kepegawaian secara massal ini telah dipraktikkan oleh Pemerintah, dengan mempertimbangkan situasi-situasi khusus. Dalam hal ini, pengalihan status kepegawaian menjadi PNS, dengan prosedur dan syarat yang berbeda dari rekrutmen CPNS, tidaklah melanggar hukum, tetapi merupakan konsekuensi dari adanya kondisi dan situasi khusus yang dihadapi oleh dosen dan tenaga kependidikan pada Universitas Brawijaya. Atas dasar hal-hal

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan dosen tetap non PNS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 3 Maret 2014.

tersebutlah, maka Paguyuban ini dibentuk untuk memperjuangkan kejelasan status seluruh dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya yang non PNS.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berangkat dari hasil pembahasan yang telah disajikan dimuka, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya di Universitas Brawijaya Malang, dimana terjadi perbedaan antara Dosen Tetap non PNS dan Dosen PNS dalam hal ini perbedaan terjadi perbedaan antara hak cuti melahirkan, hak penerimaan pensiun, ketidaktepatan pembayaran gaji Dosen Non PNS, tidak adanya jaminan kesehatan bagi Dosen Non PNS, pemberian uang makan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adalah :
  - a. Faktor Penghambat
    - a) Belum dilaksanakannya Peraturan Rektor Universitas Brawijaya mengenai kesenjangan sosial terhadap Dosen Tetap Non PNS;

- b) Masih menunggu adanya Surat Keputusan Rektor mengenai jaminan kesehatan atas Dosen Tetap Non PNS;
- c) Dosen yang bersangkutan belum jelas dengan adanya peraturan yang di terapkan oleh Universitas Brawijaya;
- d) Peraturan yang sering berubah-ubah mengenai pelaksanaan hak Dosen Tetap Non PNS terutama mengenai perjanjian Dosen Tetap Non PNS menjadi kesimpangsiuran dalam melaksanakan hak-hak Dosen Tetap Non PNS yang belum terlaksana dengan baik.

b. Faktor Pendukung

- a) Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b) Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c) Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- d) Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Adapun persyaratan atau peraturan dalam pelaksanaan hak Dosen Tetap Non PNS khususnya bagi Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini sebagai faktor pendukung antara lain:

1. Dosen Tetap Non PNS adalah pegawai UB yang diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;
2. Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan;
3. Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal;
4. Dalam melaksanakan tugas keprofesional, Dosen Tetap Non PNS berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
5. Promosi meliputi kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan akademik;
6. Jenjang jabatan akademik Dosen Tetap Non PNS terdiri atas asistensi ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor;
7. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualitas akademik doktor.

3, Solusi yang diambil Universitas Brawijaya dalam menghadapi hambatan dalam mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas

Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya:

- a. Kesejahteraan Dosen tetap Non PNS terjamin;
- b. Dosen tetap Non PNS mendapatkan penghargaan yang layak untuk pengabdianya terhadap bangsa dan Negara Indonesia;
- c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik Dosen tetap Non PNS harus memenuhi standar yang telah ditetapkan;
- d. Dosen tetap Non PNS bisa lebih professional dengan tanggung jawab yang besar.

### **Saran**

Sehubungan dengan permasalahan dari hasil analisa data yang telah disajikan dihasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran yang bermanfaat, antara lain:

1. Agar pihak Pimpinan Universitas Brawijaya membuat kebijakan yang berisikan hak-hak dan kewajiban yang sama bagi Dosen Tetap Non PNS dan Dosen PNS dalam status berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya;
2. Memberikan kesempatan yang sama bagi Dosen Tetap Non PNS dan Dosen PNS dalam hal jaminan sosial yang masih tertunda karena adanya Surat Putusan Rektor yang belum diturunkan;
3. Dalam hal pembayaran gaji hendaknya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pimpinan Universitas Brawijaya tidak

membedakan antara Dosen Tetap Non PNS dan Dosen PNS, agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil.